

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bambang sutiyo dan Sri hastuti Puspita sari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 2005.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minnesota, 1990.
- C.s.t kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Djoko Prakoso etc, *Kejahatan-kejahatan yang Membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 392.
- H. Basrah, *Ganti Rugi Menurut Ketentuan Di Dalam Buku III KUHPerdara*, FH USU, Medan 1974.
- Hermien H.K, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Indryanto Senoadji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Bina Cipta, Jakarta, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996.

Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Yogyakarta, 2006.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, 1973.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015

B. Jurnal Hukum

MahkamahKonstitusi,http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/EJurnal_1414_JURNAL2015.

ST.Burhanuddin, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara : Jurnal Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata” Makalah, Seminar, Bandung 26 Oktober 2013.

C. Perundang-undangan & Putusan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Rectstreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PERMA Nomor 1 Tahun 2013

Putusan PN DEPOK Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.DPK Tahun 2010

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/Pdt/2015 Tahun 2015

D. Web & Media Hukum

Dwidja Priyatno, <http://www.bedanews.com/prof-dr-h-dwidja-priyatno-usulkan-amandemen-uupk>, diakses 6 November 2017

<https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsibagian-ii>

<http://ianbachruddin>, 20 September 2011, diakses pada 23 Februari 2018

Info Unit Kerja Kejaksaan Agung R.I., Tim Terpadu, http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=2&sm=3

<http://> Koran Media Indonesia, 07 Mei 2012, diakses pada 27 November 2017

Verdianto I. Bitticaca “Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi”, 2010., [http://respository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5329/6/Chapter %2011.pdf](http://respository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5329/6/Chapter%202011.pdf), diakses 6 November 2017

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, 2014, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013, [http://jdih.ppatk.go.id/peraturan-mahkamah-agung-perma-nomor-1-tahun-2013-tentang-tata-cara penyelesaian-permohonan-hartakekayaan-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang](http://jdih.ppatk.go.id/peraturan-mahkamah-agung-perma-nomor-1-tahun-2013-tentang-tata-cara-penyelesaian-permohonan-hartakekayaan-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang), (Diakses pada 4 Januari 2015).

